

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I	
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA	
DAERAH (APBD)	1
A. Pengertian Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD)	1
B. Kebijakan Penyusunan APBD	3
C. Tujuan APBD	5
D. Kedudukan APBD	5
E. Fungsi APBD	5
F. Unsur APBD	6
G. Alur Proses dan Jadwal Penyusunan APBD	14
H. Kebijakan Umum APBD	16
I. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	17
J. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)	18
K. Penyiapan Raperda APBD	19
L. Penyampaian dan Pembahasan Raperda tentang APBD	20

M. Evaluasi Raperda tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	22
N. Penetapan Perda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	25
O. Perubahan APBD	25
P. Studi Kasus:	27
Q. Daftar Pertanyaan	43
Daftar Pustaka	43
BAB 2 KINERJA KEUANGAN DAERAH	45
A. Kinerja Keuangan	45
B. Surplus/Defisit	54
C. Analisis Rasio-rasio Keuangan Daerah	59
D. Studi Kasus	69
E. Daftar Pertanyaan	70
Daftar Pustaka	70
BAB 3 PENGELOLA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	73
A. Cara Penetapan APBN/D	73
B. Anatomi Dokumen Anggaran	76
C. Jenis Dana yang Tersedia	79
D. Dasar Pendanaan Pemerintah Daerah	80
E. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	97
F. Komponen Pokok Organisasi Satuan Kerja	116
G. Cara Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	117
H. Dokumen Dasar Belanja	118
I. Cara Pembayaran	125
J. Perpajakan Atas Belanja Negara	126
K. Pelaporan	140
L. Studi Kasus	148

M. Daftar Pertanyaan	146
Daftar Pustaka	147
BAB 4 PENGUPAYAAN OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH	149
A. Dasar Hukum	149
B. Definisi Pendapatan Asli Daerah	150
C. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	157
D. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	160
E. Permasalahan dan Kendala	167
F. Studi Kasus	169
G. Daftar Pertanyaan	171
Daftar Pustaka	172
BAB 5 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	173
A. Pengertian dan Fungsi Pajak Daerah	174
B. Pengertian dan Fungsi Retribusi Daerah	185
C. Perbedaan Antara Pajak dan Retribusi Daerah	192
D. Pendekatan Sistem dan Prosedur Pajak dan Retribusi Daerah	193
E. Studi Kasus	196
F. Daftar Pertanyaan	198
Daftar Pustaka	199
BAB 6 BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN	201
A. Pengertian	201
B. Dasar Hukum	202
C. Objek BPHTB	205
D. Objek Pajak yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Bukan Objek BPHTB)	208

E.	Subjek BPHTB	208
F.	Tarif BPHTB	209
G.	BPHTB atas Perolehan Hak Karena Hibah Wasiat dan Pemberian Hak Pengelolaan	209
H.	Dasar Pengenaan BPHTB	210
I.	Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)	211
J.	Cara Penghitungan BPHTB	213
K.	Saat dan Tempat BPHTB Terutang	213
L.	Pembayaran BPHTB	214
M.	Ketetapan BPHTB	215
N.	Surat Tagihan BPHTB (STB)	215
O.	Hak Wajib Pajak untuk Keberatan BPHTB	216
P.	Hak Wajib Pajak untuk Banding BPHTB	217
Q.	Hak WP untuk Pengurangan	218
R.	Pengembalian Kelebihan Pembayaran	220
S.	Kewajiban Ber-NPWP dalam Proses BPHTB	221
T.	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagai Pajak Daerah	222
U.	Studi Kasus	227
V.	Daftar Pertanyaan	230
	Daftar Pustaka	231
BAB 7	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	233
A.	Latar Belakang	233
B.	Pengertian SiLPA/SIKPA	243
C.	Perbedaan SiLPA dan SILPA	244
D.	Sisa Lebih Pengelolaan Anggaran (SiLPA)	244
E.	Penyebab Terjadinya SiLPA	248
F.	Penggunaan SiLPA	251

G. SiLPA Aktif dan SiLPA Pasif	252
H. Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Langsung	254
I. Pola Hubungan Antara SiLPA dan Pendapatan Daerah	255
J. Studi Kasus	257
K. Daftar Pertanyaan	259
Daftar Pustaka	259
BAB 8 ANALISIS STANDAR BELANJA DAERAH (APBD)	261
A. Latar Belakang	261
B. Permasalahan	262
C. Tujuan	264
D. Manfaat	265
E. Landasan Hukum dan Landasan Teori Analisis Standar Belanja	265
F. Studi Kasus	274
G. Daftar Pertanyaan	278
Daftar Pustaka	279
GLOSARIUM	281
LAMPIRAN	320
INDEKS	321
BIODATA PENULIS	327